

Peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi Nasional

Nurul Fauziyah

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210502110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

pajak; kebijakan; fiskal; ekonomi

Keywords:

tax; policy; fiscal; economic

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi nasional. Pajak sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi setiap negara salah satunya Indonesia. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian studi kepustakaan atau Library Research dengan metode kualitatif yang fokus pada fenomena yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.

ABSTRACT

This article discusses the role of taxes as a fiscal policy instrument in efforts to realize national economic development. Taxes themselves have a very important role for every country, one of which is Indonesia. Tax is defined as a taxpayer's contribution to the State that is owed to either an individual or an entity that is coercive based on applicable law, without receiving direct compensation and is used for state needs for the greatest welfare of the people. This research is a library research approach using qualitative methods that focus on phenomena that occur in society. The aim of the research is to find out the role of taxes as a fiscal policy instrument in efforts to realize national economic development.

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan serangkaian pembangunan yang berhubungan termasuk seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pembangunan nasional tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan perencanaan yang matang. Karena tanpa adanya dana yang besar baik dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri akan sangat kecil kesempatan untuk bisa negara mewujudkan cita-cita melalui pembangunan nasional ini. Dalam upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas harga tetap terjaga, kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) selalu menjadi pedoman dalam prinsip anggaran yang seimbang dan dinamis. Pembangunan setiap negara akan berjalan dan bertumbuh dengan baik, jika dari berbagai sumberdaya diolah dengan baik sehingga terdapat peningkatan pendapatan yang nanti nya bisa digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional (Murdiansyah et al., 2020). Pendapatan nasional di dapatkan dari kegiatan ekspor, impor, investasi, produksi dan konsumsi masyarakat, pajak dan lain-lain.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi setiap negara, salah satunya adalah Indonesia. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Fadilla & Wafiroh, 2022). Pajak adalah sektor pemasukan terbesar kas negara, seperti yang kita ketahui lebih dari 70% pendapatan kas Negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak daerah ataupun pajak pusat.

Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha menekan dan meningkatkan target pendapatan pajak di setiap tahun nya. Hal ini ditujukan untuk pemerintah agar dalam menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat juga meningkat (Lailiyah & Andriani, 2023). Untuk itu butuh ditingkatkan profesionalisme dalam mengelola pendapatan dibidang pajak. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Kesadaran hukum juga dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional.

Disamping itu, Direktorat Jendral Pajak telah memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri sesuai dengan asas *self assessment system* yang di anut dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Putri & Adi, 2022). Asas tersebut menyebutkan bahwa dalam perpajakan wajib pajak diberikan kepercayaan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri kepada Direktorat Jendral Pajak.

Kesejahteraan kehidupan seluruh rakyat di setiap negara terutama di bidang ekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah, karena adanya ikut serta negara merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kemakmuran rakyatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keadilan distribusi sumber daya agar dapat memperkecil kesenjangan yang terjadi. Dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan dan menargetkan ke masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah perlu menyelenggarakan layanan yang dapat di jangkau oleh kalangan masyarakat yang kurang mampu, seperti mendirikan sekolah negeri, memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan memberikan jaminan atas kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Adanya ikut serta pemerintah negara secara efektif bisa dilaksanakan dalam bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan ini sangat diperlukan dalam menciptakan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang matang dan baik (Meldona & Rizqullah, 2023). Kebijakan fiskal merupakan upaya tindakan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang (Fahadil Amin Al Hasan, 2017). Kebijakan fiskal mempunyai dua karakter yaitu kontraktif dan ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif bisa dilaksanakan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, pengurangan subsidi, dan peningkatan potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif bisa dilaksanakan dengan melakukan penambahan pengeluaran, penambahan subsidi dan pengurangan potongan pajak Kebijakan fiskal yang tercapai dalam APBN sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Wijayanti, n.d.). Saat APBN dipergunakan sesuai dengan posisi yang tepat, maka inflasi dapat

dikendalikan dengan baik. Sehingga berdampak pada pertumbuhan yang merata dalam suatu negara (Janges & PANGESTU, 2021).

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian studi kepustakaan atau Library Research. Studi kepustakaan adalah rangkaian tindakan yang mencakup membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan memahami literatur, buku atau catatan mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pajak sebagai instrument kebijakan fiskal dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.

Pembahasan

Kebijakan Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Salah satu alat yang digunakan negara untuk menjalankan tugasnya, termasuk pembelian barang publik dan tugas lain seperti alokasi, distribusi, dan stabilisasi, adalah perpajakan. Seluruh masyarakat akan mendapat manfaat dari barang publik ini. Keputusan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk membeli barang dan jasa ketika pasar tidak mampu atau tidak mau menyediakannya karena kegagalan pasar adalah fungsi alokasi yang disengketakan. Penilaian pasar bahwa produksi barang atau jasa tidak efisien inilah yang menyebabkan kegagalan pasar ini. Untuk mengalokasikan uang untuk pembelian barang dan jasa, pemerintah mutlak diperlukan.

Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan untuk memastikan bahwa kekayaan dibagi secara merata di antara semua lapisan masyarakat, dan melalui perpajakan negara dapat menerapkan kesetaraan, seperti penyediaan layanan kesehatan yang dapat diakses dan subsidi untuk barang-barang penting. Pemerintah melakukan fungsi stabilitas dengan memanfaatkan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mengatasi masalah ekonomi makro seperti tingkat lapangan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Secara filosofis, salah satu fungsi pajak itu sendiri yaitu fungsi penerimaan atau anggaran dapat digunakan untuk menentukan seberapa adil pajak dipungut di Indonesia. Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara, artinya digunakan untuk mendanai semua pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran untuk pembangunan dan pegawai.

Proses pemungutan pajak memenuhi konsep keadilan karena pajak pada hakekatnya dipungut untuk pembangunan nasional, yang berarti seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut. Karena diperlukan undang-undang yang mengatur pemungutan pajak untuk memenuhi anggaran negara, maka pajak yang dipungut oleh pemerintah juga telah memajukan kedaulatan rakyat. Menurut sistem penilaian kedinasan, yang menyerahkan semua tanggung jawab penghitungan dan pemungutan pajak ke tangan pejabat pajak, aparat pajak diberi wewenang untuk memutuskan besarnya pajak yang harus dibayar setiap

tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk memutuskan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyerahkan semua keputusan penghitungan dan pembayaran pajak di tangan wajib pajak.

Setiap undang-undang perpajakan di Indonesia berupaya untuk memajukan gagasan keadilan wajib pajak. Hal ini terlihat dari pemungutan pajak penghasilan. Undang-undang perpajakan telah ada setidaknya sejak tahun 1983, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Kepercayaan sosial yang tinggi terhadap pajak diperlukan, dipadukan dengan tumbuhnya citra/persepsi positif terhadap pajak untuk mencapai voluntary tax compliance. Salah satu hal yang perlu dikembangkan adalah aturan perpajakan yang jelas dan tegas yang melindungi masyarakat serta keterbukaan dalam cara pemerintah menggunakan pendapatan. Berkembang untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban, kepercayaan sosial, dan persepsi pajak yang positif sehingga masyarakat mengetahui tujuan pemungutan pajak, bagaimana pemerintah menangani penerimaan pajak, dan manfaat apa yang diterima masyarakat sebagai akibat dari pemerintah kegiatan pemungutan pajak. Penerimaan pajak (tax revenue) akan naik jika semua itu sudah terlaksana.

Peran Pelaku Ekonomi dalam Menunjang Fiskal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kebijakan fiskal pemerintah mempengaruhi bagaimana pendapatan digunakan. Pengeluaran pemerintah atas nama masyarakat melalui pinjaman publik membantu membangun modal dan mempercepat kemajuan ekonomi jangka Panjang (Heliany, 2021). Tujuan utama kebijakan fiskal biasanya adalah distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu, tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mengelola keuangan pemerintah dengan cara yang mendukung perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan negara sangat penting untuk membiayai fungsi normal pemerintah sendiri serta berfungsi sebagai “sarana” untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pemerataan pendapatan. Pemerintah mengalami defisit anggaran jika pengeluarannya untuk jangka waktu tertentu umumnya satu tahun lebih tinggi daripada penerimaan pajaknya. Sebaliknya, jika penerimaan pajak lebih besar dari pengeluaran, maka akan terjadi surplus anggaran bagi pemerintah. Pinjaman pemerintah untuk menutupi defisit anggaran, disisi lain, bobot utang pemerintah jauh lebih kecil selama surplus anggaran.

Ada beberapa indikator penilaian, antara lain: **Pertama**, sektor rumah tangga dengan indikator yang menjadi tolok ukur konsumsi rumah tangga dan investasi (Deksa Imam Suhada, Dessy Rahmadani, dkk 2022). Sektor ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelaku ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan tabel yang menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menurut pengelompokan komoditas baik makanan maupun non makanan yang selalu meningkat, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kuatnya konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan oleh tingginya pendapatan rumah tangga yang secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Tenaga kerja merupakan sektor korporasi yang menggunakan indikator sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi (Anis Farida & Indah Yuliana, 2022). Tenaga kerja akan memberikan dampak yang menguntungkan sebagai peningkatan produktivitas yang disertai dengan lebih banyak tenaga kerja, yang kemudian mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, pengeluaran konsumsi pemerintah berfungsi sebagai indikasi dan tolak ukur untuk sektor pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu jenis pengeluaran, dan jika tinggi, semua jenis pengeluaran yang diproyeksikan juga akan lebih tinggi. Konsumsi akan meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah ketika pendapatan meningkat. Pendapatan pemerintah akan meningkat, yang akan mendorong ekspansi ekonomi.

Pelaku ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan pembangunan ekonomi. Kemajuan dan stabilitas diperlukan dari berbagai sektor dan aspek kehidupan untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pelaku ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa. Penilaian efektivitas memerlukan komunikasi dengan proses untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan anggaran, kerangka waktu, dan jumlah staf yang telah ditetapkan. Namun, kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi hanya mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17%. Pelaku ekonomi masih belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena belum mencapai target yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya.

Peran Kebijakan Fiskal dalam Mewujudkan Ekonomi Nasional

Kebijakan publik mencakup elemen penting yang disebut kebijakan fiskal. Salah satunya adalah kebijakan publik. Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi mempengaruhi hasil fiskal, yang dipengaruhi oleh tujuan sosial ekonomi, komitmen irasional, dan sifat sistem ekonomi. Konsep hidup sejahtera dibatasi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua orang di dunia dalam sistem ekonomi sekuler.

Kebijakan fiskal lebih berbobot dalam realisasi ekonomi nasional daripada laju pertumbuhan. Mengingat laju tingkat tabungan di negara-negara industri cukup tinggi untuk memungkinkan penyerapan modal masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. bahwa tingkat pendapatan suatu negara meningkat dengan tingkat tabungannya. Sebaliknya, terdapat kecenderungan pendapatan yang rendah di negara-negara berkembang, meskipun tuntutan belanja rumah tangga tidak dapat dikurangi. Penghematan selanjutnya akan secara otomatis dikurangi atau mungkin dihilangkan.

Suatu negara membutuhkan sistem saluran masuk, pengeluaran elastis, dan pengeluaran fleksibel untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal mendukung lingkungan untuk investasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, antara lain: **pertama**, berusaha mengubah bagaimana uang yang dialokasikan dari konsumsi yang tidak penting (konsumsi non-esensial) digunakan sebagai dana modal kerja atau pembangunan. **Kedua**, membuat iklim usaha menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan di sektor primer (daerah prioritas tinggi) dan swasta didorong untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. **Ketiga**, pemanfaatan sumber daya alam

secara efektif karena berasal dari sumber alam dibatasi, tidak dapat direformasi, dan untuk memastikan tuntutan generasi mendatang. **Keempat**, selama itu dapat membantu perekonomian masyarakat, jangan sampai Anda mengesampingkan penggunaan kemajuan teknologi yang dibawa oleh investasi asing.

Kebijakan fiskal merujuk pada tindakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik. Peran kebijakan fiskal sangat penting dalam mewujudkan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Berikut ini beberapa peran penting kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan tersebut:

1. **Pengaturan Pendapatan dan Pengeluaran** Kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran publik. Pemerintah dapat menggunakan instrumen seperti pajak dan subsidi untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran agar sesuai dengan tujuan ekonomi nasional. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan pajak pada barang mewah untuk mengumpulkan pendapatan yang lebih besar atau memberikan subsidi pada sektor-sektor yang dianggap strategis.
2. **Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi** Kebijakan fiskal dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik dalam sektorsektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi, seperti infrastruktur dan sektor industri tertentu. Pengeluaran ini akan mendorong aktivitas ekonomi dan investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
3. **Pengaturan Stabilitas Makro ekonomi** Kebijakan fiskal juga berperan dalam mencapai stabilitas makro ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi, mengurangi defisit anggaran, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Misalnya, jika inflasi meningkat, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran publik atau menaikkan pajak untuk mengurangi tekanan inflasi.
4. **Redistribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial** Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai tujuan redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. Pemerintah dapat mengenakan pajak progresif, yang memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi untuk orang-orang kaya, dan menggunakan pendapatan tersebut untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendapatan pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.
5. **Pengendalian Defisit Anggaran dan Hutang Negara** Kebijakan fiskal diperlukan untuk mengendalikan defisit anggaran dan hutang negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengeluaran publik tidak melebihi pendapatan yang dihasilkan. Jika defisit anggaran terlalu besar, itu dapat menyebabkan ketergantungan pada hutang negara yang berlebihan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan menjaga keberlanjutan fiskal.

Kesimpulan

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi setiap negara, salah satunya adalah Indonesia. Pajak adalah sektor pemasukan terbesar kas negara, seperti yang kita ketahui lebih dari 70% pendapatan kas Negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak daerah ataupun pajak pusat.

Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha menekan dan meningkatkan target pendapatan pajak di setiap tahun nya. Hal ini ditujukan untuk pemerintah agar dalam menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Adanya ikut serta pemerintah negara secara efektif bisa dilaksanakan dalam bentuk kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal biasanya adalah distribusi pendapatan dan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan fiskal yang seimbang dan komprehensif. Kebijakan fiskal harus mempertimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta memperhatikan kondisi ekonomi global dan domestik. Selain itu, kebijakan fiskal juga harus didukung oleh kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter dan kebijakan struktural, guna menciptakan sinergi dan koordinasi yang efektif dalam mencapai tujuan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Anis Farida, & Indah Yuliana. (2022). Pengaruh Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia Periode Tahun 2006-2020. *Malia (Terakreditasi)*, 13(2), 181–192. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3016>
- Deksa Imam Suhada, Dessy Rahmadani, D. (2022). Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3201–3208.
- Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78–89. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>
- Fahadil Amin Al Hasan, R. Q. I. (2017). Instrumen Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). *'Adliya*, 11(2), 165–190.
- Heliany, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiarni*, 8(1), 15–21.
- Janges, Z. P., & PANGESTU, I. A. (2021). Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum*, 17(1), 43–54. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1161>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Meldona, & Rizqullah, A. (2023). Analisis Flypaper Effect dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Mediasi Belanja Daerah. 4(3), 832–842.

<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2692>

- Murdiansyah, I., Wahyuni, N., & Siswanto, S. (2020). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang). *BISEI: Jurnal Bisnis Dan ...*, 05(April), 54–63.
- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan pajak. 321–330.
- Wijayanti, A. (n.d.). Peran kebijakan fiskal pemerintah indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi akibat dampak pandemi covid-19. 3(1).
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/19-resesi>